

COVID-19 DAN EKSPEKTASI EKONOMI DALAM TATANAN BERKEHIDUPAN BARU (NEW-NORMAL): EVALUASI DAN KEBIJAKAN EKONOMI DI PROPINSI SUMATERA BARAT

COVID-19 AND ECONOMIC EXPECTATIONS IN A NEW-NORMAL ORDER: EVALUATION AND ECONOMIC POLICY IN WEST SUMATRA PROVINCE

Fajri Muharja¹, Fery Andrianus²
Fakultas Ekonomi Universitas Andalas
fajrimuharja@eb.unand.ac.id

ABSTRAK : Penurunan aktifitas ekonomi terdampak wabah Covid 19 memiliki ciri berbeda dengan krisis ekonomi yang dialami pada tahun 1998 dan 2008. Dampak yang terjadi akibat Covid 19 adalah penurunan tajam terhadap aktifitas ekonomi yang membutuhkan interaksi secara fisik. Secara langsung pandemic mengganggu sisi produksi dan pengeluaran masyarakat. Kajian ini bertujuan mengevaluasi dan merekomendasikan kebijakan ekonomi yang relevan dalam menghadapi tatanan kehidupan baru (new-normal) pandemi Covid 19 di Sumatera Barat. Dengan Menggunakan realisasi perekonomian tahun 2019 dan triwulan I-2020 sebagai basis analisis data pre-pandemi dan kondisi saat triwulan II-2020 sebagai kondisi saat terdampak. Kajian ini juga dilengkapi dengan persepsi 45 ekonom Sumatera Barat dalam mengekspektasi aktifitas ekonomi, daya beli dan kepercayaan dunia usaha dalam tatanan kehidupan baru (new-normal) dalam 3 (tiga), 6 (enam) dan tahun 2020 dengan metode analisis deskriptif. Temuan utama kajian ini adalah Sumatera Barat terdampak Covid tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan daerah lain. Namun dalam periode new normal, ekspektasi diberikan cukup tinggi terhadap perbaikan ekonomi pada periode new normal.

Kata Kunci: Covid-19, Ekspektasi Ekonomi, New-Normal

ABSTRACT : *The decline in economic activity affected by the Covid 19 outbreak has different characteristics from the economic crisis experienced in 1998 and 2008. The impact caused by Covid 19 is a sharp decline in economic activity that requires physical interaction. The pandemic directly disrupts the production and expenditure side of the community. This study aims to evaluate and recommend relevant economic policies in dealing with the new life order (new-normal) of the Covid 19 pandemic in West Sumatra. By using the economic realization in 2019 and the first quarter of 2020 as a basis for analyzing pre-pandemic data and conditions during the second quarter of 2020 as conditions when affected. This study is also complemented by the perceptions of 45 West Sumatran economists in their expectations of economic activity, purchasing power and confidence in the business world in a new life order (new-normal) in 3 (three), 6 (six) and 2020 with descriptive analysis methods. The main finding of this study is that West Sumatra is not affected by Covid too much when compared to other regions. However, in the new normal period, expectations are given quite high for economic improvement in the new normal period.*

Keywords: Covid-19, Economic Expectations, New-Normal

JEL: I15, O10, P35

A. PENDAHULUAN

Penurunan aktifitas perekonomian saat ini terlihat sangat berbeda kondisinya dengan periode krisis tahun 1998 dan 2008. Pandemi Covid 19 memberikan dampak terhadap pengurangan aktifitas ekonomi terutama yang membutuhkan interaksi secara fisik dalam masyarakat. McKibbin & Fernando (2020) dan Surico & Galeotti (2020) menjelaskan bahwa wabah penyakit (*pandemi*) dapat memberikan transmisi buruk terhadap perekonomian. Dampak secara langsung jelas terjadi pada sisi produksi yang berkaitan erat dengan penawaran tenaga kerja (*labor supply*). Begitu juga pada sisi pengeluaran, kecenderungan utama terjadi hanya melakukan pemenuhan kebutuhan dasar. Kegiatan *non-esensial* seperti pariwisata, hiburan, pertunjukan olah raga, dan sebagainya mengalami penurunan tajam.

Sektor-sektor yang menjadi menopang kegiatan *non-basic needs* masyarakat juga mengalami imbas besar. Hal ini menjadikan penurunan yang sangat tajam pada sisi permintaan yang mengalami pergeseran, pengurangan kuantitas dan kenaikan harga, berkurangnya jumlah uang beredar yang berujung kepada krisis perekonomian. Semakin lama pandemi covid-19 berlangsung, maka kerugian yang dihadapi dalam perekonomian akan semakin besar yang terlihat dari semakin besarnya penurunan kesejahteraan sosial (*economic welfare*) melalui penurunan surplus produsen dan konsumen. Hal ini sejalan dengan dari beberapa studi yang menyatakan bahwa kesehatan populasi berhubungan positif dengan kesejahteraan sosial dan pertumbuhan ekonomi (Pritchett dan Summer, 1996; Bloom dan Sachs, 1998; Bhargava et.al, 2001, Cuddington et.al, 1994; Cuddington dan Hancock, 1994; Robalino et.al, 2002a; Robalino et.al, 2002b; WHO Commission on Macroeconomics and Health, 2001; Haacker, 2004) dalam (McKibbin dan Fernando, 2020)..

Sebagai faktor utama penyebab tajamnya penurunan aktifitas ekonomi adalah tingginya resiko terpapar Covid 19, usaha pemutusan mata rantainya merupakan hal mutlak dilakukan agar perekonomian dapat kembali tumbuh sebagai mana mestinya. Secara ekonomi dipandang tidak ada sebetulnya *trade-off* antara pengendalian penyebaran virus dengan pemulihan perekonomian baik di tingkat lokal maupun nasional. Artinya bertatanan kehidupan baru (*new normal*) membutuhkan standar hidup baru dalam menjalankan perekonomian.

Periode tatanan berkehidupan normal baru (*new-normal*) adalah tahapan yang harus dilalui setiap daerah setelah melewati masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akibat Covid 19. Periode PSBB merupakan masa pelaksanaan *resque program* untuk penanggulangan dampak kesehatan dan social ekonomi masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir efek domino yang ditimbulkan Covid 19 mulai dari krisis social, ekonomi dan keuangan yang berkelanjutan.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Sumatera Barat pelaksanaannya lebih awal dan dengan waktu cukup lama dibandingkan propinsi lainnya di Indonesia sejak 22 April -7 Juni 2020. Pelarangan kegiatan berkumpul, penutupan hotel, pusat perbelanjaan dan tempat aktivitas ekonomi lainnya, peniadaan penerbangan dan penutupan akses keluar masuk jalur darat kecuali untuk angkutan barang.

Perekonomian Sumatera Barat selama masa PSBB 1 dan 2 (triwulan II-2020) terkontraksi sebesar (4,91%) (yoy). Namun secara qttq perekonomian ini juga terkontraksi lebih besar lagi (5,50%). Hal ini relative lebih baik dari pertumbuhan nasional terkontraksi (5,32%) yoy, Laju pertumbuhan PDRB sejak tahun 2018 pada Q2 pertumbuhan sebesar 5,11 (yoy), tahun 2019 Q2 sebesar 5,04% (yoy) dan tahun 2020 Q2 terdampak covid 19 menjadi terkontraksi (4,91%) (yoy). Pertumbuhan qttq PDRB sejak 2018 terlihat bahwa Q2 2018 tumbuh sebesar 3,07% (qttq), 2019 pertumbuhan Q2 naik sebesar 3,28% (qttq), dan pada Q2 2020 terkontraksi sebesar 5,50% (qttq).

PDRB menurut lapangan usaha (LU) pada Q2-2020 secara qttq memperlihatkan sektor komunikasi dan informasi mengalami pertumbuhan tertinggi 4,98% (qttq) dengan penyebab adalah karena adanya sekolah daring, bekerja daring dan belanja online. Selanjutnya sektor pertanian,

perkebunan dan perikanan. Meskipun tidak signifikan, namun mampu tumbuh sebesar 0,12% (qtr) sebagai dampak dari tanaman padi yang produksinya meningkat. Jika dilihat pertumbuhan yoy terlihat bahwa sektor informasi komunikasi tumbuh dengan pesat sebesar 11,52% (yoy), diikuti jasa kesehatan dan kegiatan social 4,21% (yoy), dan jasa pendidikan 2,23% (yoy).

Tujuan utama kajian ini mengungkap seberapa besar dampak pandemi terhadap perekonomian Sumatera Barat. Bagaimakah kondisi makro ekonomi daerah, anggaran pemerintah, dan perilaku perbankan dalam menghadapi pandemic Covid 19 di Sumatera Barat. Bagaimanakah ekspektasi masyarakat terhadap kegiatan ekonomi, daya beli dan kepercayaan dunia usaha dalam periode new normal. Manfaat utama kajian ini adalah sebagai *snapshot* dari masing-masing indikator untuk menjelaskan perekonomian daerah dalam mendukung kebutuhan kebijakan ekonomi nasional yang bersifat bottom-up dan agregatif. Ruang lingkup kajian meliputi realisasi dan estimasi terhadap indikator makroekonomi dan keuangan daerah sebelum, saat (PSBB) I dan II) dan pasca Covid-19 (new-normal) di Propinsi Sumatera Barat

B. METODE PENELITIAN

Kajian ini merupakan bagian dari studi secara nasional yang dirancang dengan sifat *bottom-up* dan *agregatif* dengan melakukan penilaian dampak covid 19 terhadap perekonomian daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan enam indikator yang digunakan: 1) pertumbuhan ekonomi, 2) inflasi, 3) pengangguran, 4) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, 5) perbankan, dan 6) perbankan daerah (BPD). Sumber data menggunakan laporan Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Data Keuangan Daerah. Periode waktu kajian ini adalah tahun 2019 dan Quartal 1-2020 yang dianggap sebagai baseline realisasi perekonomian sebelum Covid 19, Kwartal II – 2020 dianggap sebagai kondisi ekonomi saat pandemic, dan wartal III-2020 dianggap sebagai kondisi pasca pandemic. Penelitian ini diharapkan juga menghasilkan prognosa/perencanaan ekonomi tahun 2020 (3 dan 6 bulan kedepan) dan tahun 2021.

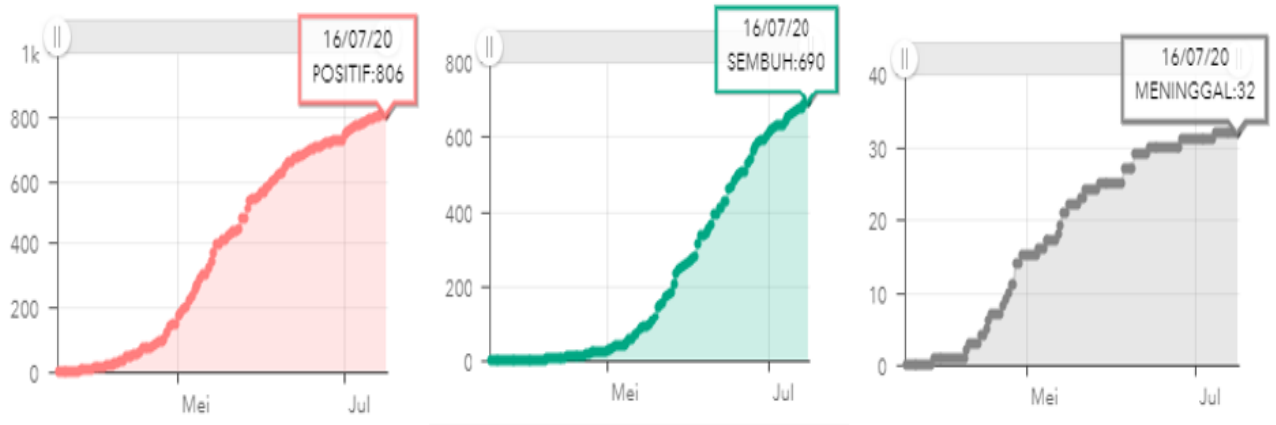
Kajian ini juga menganalisis ekspektasi masyarakat melalui survei tentang aktifitas ekonomi, daya beli masyarakat dan kepercayaan dunia usaha terhadap perekonomian daerah. Survei dilakukan secara *online* yang diwakili oleh 45 (empat puluh lima) sampel ekonom propinsi Sumatera Barat dengan karakteristik responden 33,35% berstatus Doktor bidang ilmu ekonomi, 28,9% berstatus magister ekonomi, dan 37,8% berstatus sarjana ekonomi. Periode survei online ini dilaksanakan secara terbatas sejak 27 Juli – 1 Agustus 2020. Responden tersebar di beberapa kabupaten dan kota di Sumatera Barat yang sebagian besar berdomisili di Kota Padang.

C. ANALISIS DAN DISKUSI

Covid 19 dan Makroekonomi Daerah

Sampai 05 Agustus 2020, tingkat *specimen positive rate (PR)* di propinsi Sumatera Barat adalah 1,5%. Ini merupakan angka terbaik dalam penanggulangan Covid untuk propinsi di Indonesia. Nilai PR untuk Indonesia masih berada pada posisi 12% yang jauh melewati ambang batas PR yang ditetapkan WHO kecil dari 5%. Namun dalam dua minggu terakhir, di Sumatera Barat juga muncul kluster baru terinfeksi Covid 19 di tempat tempat kerja. Hal ini menimbulkan kekhawatiran pada saat new-normal dimana masyarakat mulai kurang peduli dan longgar dalam melaksanakan protocol covid 19 baik di rumah maupun di luar rumah.

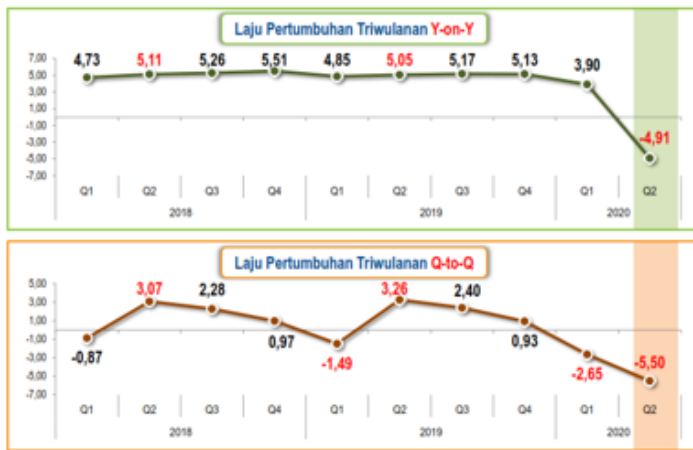
Gambar 1. Akumulasi Harian Kasus Positif, Sembuh dan Meninggal Covid 19 di Sumatera Barat



Sumber: Pemerintah Propinsi Sumatera Barat (2020)

Secara makroekonomi, sebelum Covid 19 pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat mengalami tren melambat sejak tahun 2012 (Meskipun sempat terakserelasi pada tahun 2017, namun terus melanjutkan tren menurun sampai tahun 2019, kuartai I-2020.

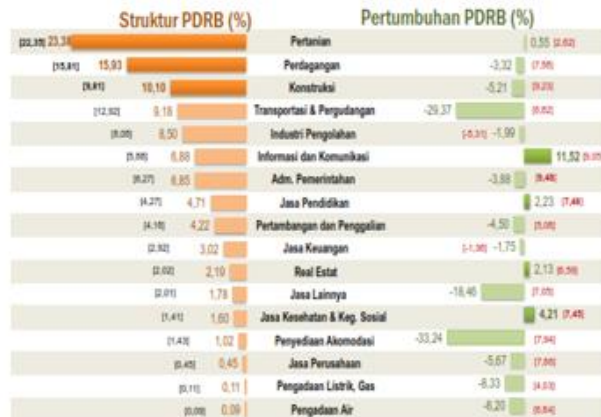
Gambar 2. Tren Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat



Sumber: BPS (2020)

perekonomian sudah terdampak oleh pandemic Covid 19 yang terjadi sejak Maret 2020. Selama masa PSBB 1 dan 2 (triwulan II-2020) terkontraksi sebesar (4,91%) (yoy). Namun secara qttq perekonomian ini juga terkontraksi lebih besar lagi (5,50%). Hal ini relative lebih baik dari pertumbuhan nasional terkontraksi (5,32%) yoy

Gambar 2. Struktur dan Pertumbuhan PDRBSumatera Barat



Sumber: BPS (2020)

Penampilan perekonomian Sumatera Barat sebelum pandemic terkesan berjalan relatif biasa namun cenderung mengalami perlambatan. Tahun 2019 memperlihatkan bahwa Sumatera Barat tumbuh sebesar 5,05% (yoy) relatif lebih baik dibandingkan dengan rata-rata nasional 5,02% (yoy) (Bank Indonesia, 2020). Memasuki Kwartal I-2020 memperlihatkan ekonomi Sumatera Barat tumbuh sebesar 3,02% (yoy) relatif juga lebih baik dibanding rata-rata pertumbuhan regional Sumatra 3,25% (yoy) dan rata-rata nasional 2,97% (yoy). Pada Kwartal ini,

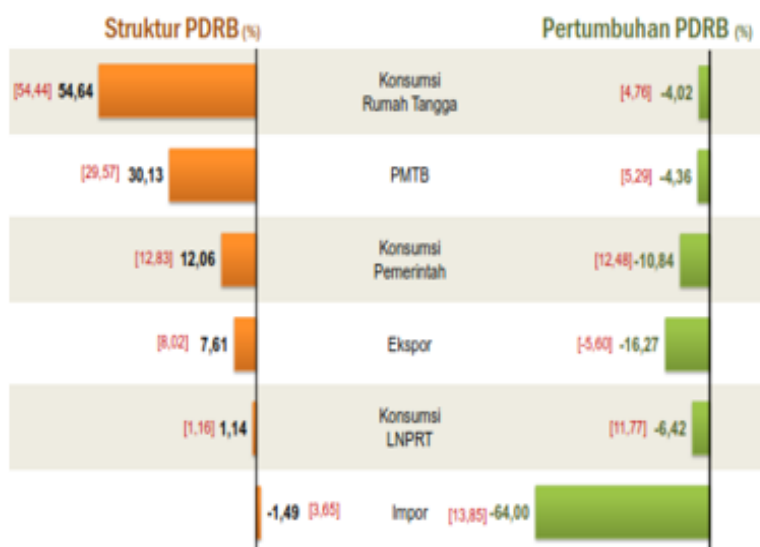
Struktur dan pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha (LU) terlihat bahwa sektor pertanian (2019) 2,62% yoy) dengan pangsa 22,35%, sedangkan tahun ini 2020 hanya mampu 0,55% (yoy) dengan pangsa lebih tinggi 23,38%. Begitu juga sektor perdagangan 2019 tumbuh sebesar 7,58 (yoy) dengan pangsa sebesar 15,81 dan pada tahun 2020 ini pertumbuhannya terkontraksi (3,32) dengan pangsa naik menjadi 15,91 (yoy). Sektor konstruksi 2019 tumbuh sebesar 7,58% (yoy) dengan pangsa 9,81% dan tahun 2020 terkontraksi -5,21%

(yoy) dengan pangsa naik menjadi 10,10%. Sektor transportasi dan pergudangan memiliki dampak negative tertinggi oleh Covid 19 dimana sebelumnya 2019 tumbuh 6,82% (yoy) dengan pangsa 12,92% terkontraksi besar pada tahun 2020 sebesar -29,37% (yoy) dengan pangsa juga turun menjadi 9,18%.

Sektor lain yang juga mengalami dampak negative oleh Covid 19 adalah pendanaan akomodasi terkontraksi sampai -33,24% (yoy) dengan pangsa 1,02%, jasa lainnya terkontraksi sebesar -18,46% (yoy) dengan pangsa 1,78%. Industri pengolahan Sumatera Barat tidak begitu terdampak Covid 19 jika dibandingkan tahun sebelumnya hanya terkontraksi sebesar -1,99 (yoy) dengan pangsa 8,50% sedangkan tahun sebelumnya terkontraksi sebesar -5,31% (yoy) dengan pangsa 5,88%. Hal ini dikarenakan sektor perkebunan sawit di Sumatera Barat sebelumnya mengalami re-planting dan beroperasinya perusahaan baru sawit di Sumatera Barat.

Pertumbuhan PDRB dari sisi pengeluaran terlihat bahwa secara qtt, tahun 2020 terkontraksi sebesar 5,05%. Dalam hal ini hanya konsumsi pemerintah yang tumbuh positif sebesar 23,87% (qtt) sektor lainnya terkontraksi dengan nilai terbesar adalah impor luar negeri -3315% (qtt) dan ekspor -21,63% (qtt). Perbandingan antar tahun (yoy) juga memperlihatkan bahwa tidak ada satupun sektor pengeluaran yang tumbuh secara positif. Sektor yang terkontraksi besar adalah impor luar negeri mencapai -64,00% (yoy) dan ekspor luar negeri sebesar -16,27%.

Gambar 3 Struktur & Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Sumatera Barat



Sumber: BPS (2020)

Selama pandemic, daya beli masyarakat terus terjadi penurunan dibanding periode sebelumnya. Inflasi Juli 2020, Kota Padang mengalami deflasi -0,11% (mtm) dan Bukittinggi -0,39% (mtm) di atas rata-rata nasional -0,10% (mtm). Berdasarkan tahun kalender 2020, kota pada mengalami inflasi 0,25 dan Bukittinggi 0,66%. Untuk tahunan, Kota Padang deflasi -0,56% (yoy) dan Bukittinggi inflasi 0,25% (yoy). Dari 24 kota IHK Sumatera, 5 kota mengalami inflasi dan 19 kota mengalami deflasi. Inflasi tertinggi adalah tanjung pinang (0,34%), inflasi terendah adalah pangkal pinang (0,06%). Deflasi tertinggi

adalah Pematang Siantar -0,76% dan deflasi terendah Gunungsitoli -0,01%. Periode ini, dari 19 kota deflasi, Padang ranking 16 dan Bukittinggi ranking 3 di Sumatera.

Sebelumnya Juni 2020 juga mengalami deflasi sebesar -0,16 (mtm), atau menurun dibandingkan dengan Mei 2020 yang mengalami inflasi sebesar 0,63% (mtm). Deflasi pada bulan Juni 2020 tersebut didorong oleh penurunan harga beberapa komoditas kebutuhan pokok, transportasi udara dan darat antar kota. Secara tahunan inflasi bulan Juni 2020 sebesar 0,18% (yoy). Rendahnya inflasi tahunan di bawah rata-rata 3 tahun terakhir (3,93% yoy) mengindikasikan daya beli masyarakat yang rendah di tengah pandemic Covid 19. Sampai dengan akhir tahun 2020, pergerakan inflasi daerah ini masih dalam target $3,0\% \pm 1\%$. (Lihat lampiran 3 dan 4)

Penyerapan tenaga kerja sebelum pandemic terlihat membaik di tengah perlambatan ekonomi sampai pada triwulan I-2020. Hal ini diiringi penurunan tingkat pengangguran. BI dan

BPS pada bulan Februari 2020 mencatat belum terlihat dampak Covid 19 dalam hal ini. Penyerapan tenaga kerja masih didominasi oleh sektor pertanian dan perdagangan. Namun penyerapan di sektor perdagangan persentasenya cenderung menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang disebabkan peralihan tenaga kerja ke industri pengolahan dan jasa. Pada September 2019, indikator ketimpangan ekonomi terjadi sedikit memburuk 0,305 (2018) menjadi 0,307 (2019). Namun kondisi ini relative lebih baik dibandingkan dengan 9 (sembilan) propinsi di kawasan Sumatra. Selanjutnya, Nilai Tukar Petani (NTP) mengalami peningkatan pada triwulan I-2020, mencapai 102,59 atau meningkat dibandingkan triwulan IV-2019 sebesar 98,36 walaupun masih di bawah nilai nasional. Setidaknya hal ini dapat dimaknai terjadi perbaikan peningkatan kemampuan atau daya beli petani di pedesaan. (Lihat Lampiran 5)

Kebijakan anggaran yang tepat bisa mengurangi dampak negatif pandemi terhadap perekonomian. Secara teoritis, kebijakan anggaran pemerintah mempengaruhi perekonomian melalui sisi permintaan (demand side policy) atau sisi penawaran (supply side policy). Kebijakan disisi demand bertujuan untuk mempertahankan daya beli dalam jangka pendek. Pemberian BLT oleh pemerintah saat PSBB 1 dan 2 sebelumnya digunakan untuk keperluan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebelum Covid memperlihatkan keadaan mulai terpengaruh dengan suasana perlambatan ekonomi dan tahapan sistem administrasi keuangan pada awal tahun anggaran. Adrison & Flukera (2016) menjelaskan bahwa penyerapan anggaran pemerintah daerah di Indonesia pada kwarta II rata-rata capaiannya di bawah 50% kecuali pada tahun 2014. Peningkatan penyerapan secara drastic dapat terjadi pada kuartal IV. Proses pengadaan (procurement) yang membutuhkan waktu menjadi salah satu faktor pemicu rendahnya penyerapan. Akibat untuk belanja modal pada semester pertama jauh lebih kecil dibandingkan belanja rutin.

Realisasi pendapatan propinsi sampai triwulan I-2020 (17,2%) dengan nilai Rp. 1,2 Triliun lebih rendah dibandingkan dengan triwulan I-2019 (20,49%). Penurunan ini terjadi karena turunya pos dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Realisasi belanja pada periode tersebut. Realisasi paling rendah adalah pada komponen belanja bagi hasil propinsi, kabupaten, kota, pemerintah desa dan bantuan keuangan kepada propinsi, kabupaten, kota, pemerintah desa dan partai politik yang belum terealisasi sama sekali. Hal ini disebabkan prioritas belanja karena melambatnya perekonomian dan belum lengkapnya administrasi keuangan di awal tahun. (Lihat Lampiran 6 dan 7)

Stabilitas sistem keuangan sebelum pandemi sampai pada triwulan I-2020 masih terjaga dengan baik. Aset perbankan pada periode tersebut tumbuh sebesar 0,53% (yoy) atau sebesar Rp. 60,53 Triliun, melambat dibandingkan triwulan IV-2019 yang tumbuh dengan 4,21% (yoy). Dana pihak ketiga (DPK) perbankan tumbuh melambat 3,88% (yoy) dengan nilai Rp. 42, 29 Triliun dibandingkan dengan periode IV-2020 sebesar 7,30% (yoy). Kredit/pembiayaan triwulan I-2020 tumbuh sebesar 4,97% (yoy) senilai Rp. 58,41 Triliun meningkat dibanding triwulan IV-2019 yang tumbuh sebesar 4,81% (yoy).

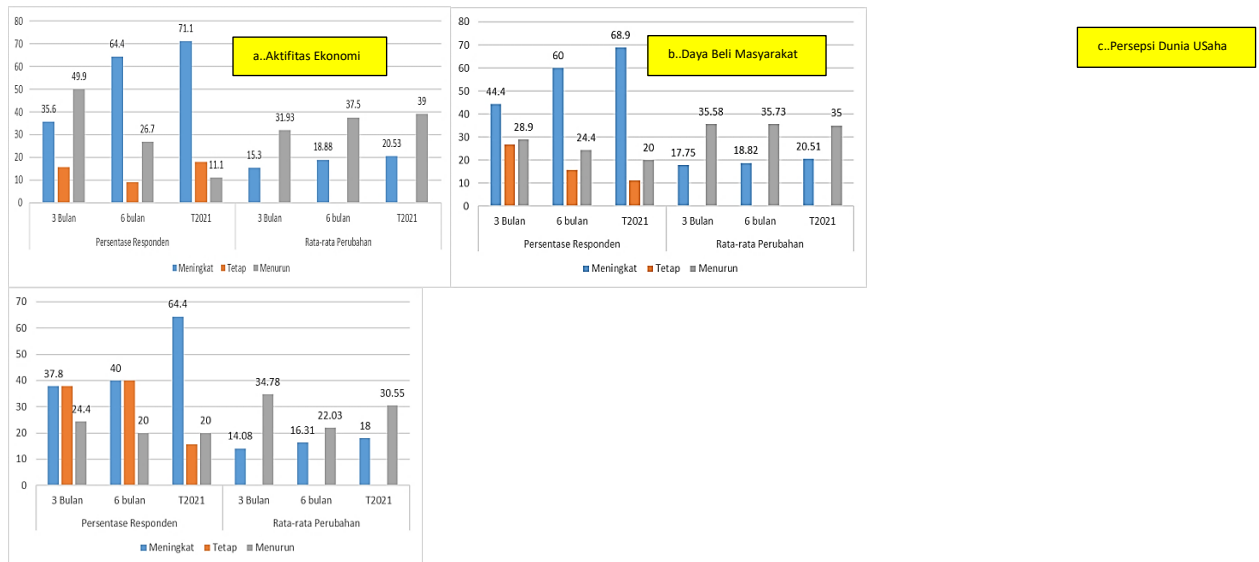
Memasuki triwulan II-2020, pertumbuhan kredit terjadi perlambatan dibanding triwulan I-2020. Pertumbuhan DPK meningkat dan kredit pembiayaan melambat sebesar 2,85% (yoy), dengan nilai Rp. 57 Triliun. Kredit korporasi dan rumah tangga juga melambat 1,7% dan 3,92% (yoy). Namun disisi lain terjadi peningkatan DPK sebesar 5,27% (yoy) dengan nilai Rp 44, 7 T. NPL kredit UKM menurun (5,2%) sejalan dengan program restrukturisasi kredit perbankan. Kondisi ini dapat mengkonfirmasi terjadinya perlambatan ekonomi pada kuartal II jelas disebabkan oleh pandemic.

Ekspektasi Aktifitas Ekonomi, Daya Beli dan Kepercayaan Dunia Usaha

Persepsi masyarakat tentang aktifitas kegiatan ekonomi, daya beli masyarakat dan kepercayaan dunia usaha diwakili oleh 45 sampel ekonom Propinsi Sumatera Barat memperlihatkan sikap

optimisme tinggi terhadap perekonomian daerah untuk 3 bulan, 6 bulan dan 1 tahun kedepan. Responden yang memilih aktifitas ekonomi terus meningkat proporsinya terus meningkat sejalan dengan perubahan persentase peningkatan aktifitas ekonomi masing-masing waktu dibandingkan dengan kondisi saat survei dilakukan. Sebaliknya terdapat juga responden yang pesimis terhadap perekonomian daerah, namun dari setiap periode waktu tersebut terus menurun.

Gambar 3: Ekspektasi Aktifitas Ekonomi, daya beli Masyarakat & Kepercayaan Dunia Usaha Sumatera Barat



Keterangan: Data diolah penulis

Kecenderungan yang sama juga terjadi pada ekspektasi daya beli masyarakat dan kepercayaan pengusaha terhadap perekonomian daerah memasuki tahapan new-normal selanjutnya. Optimisme ini muncul karena kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan Covid 19 terkesan sangat baik dibandingkan dengan propinsi, kabupaten dan kota lainnya di Indonesia. Tingginya ekspektasi ekonomi masyarakat dalam periode new-normal juga terganggu oleh munculnya klaster baru positif Covid 19 untuk kelompok perkantoran dalam beberapa minggu terakhir. Untuk itu diperlukan pengendalian dan penguatan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya penerapan protocol Covid 19 dalam New-normal. Jika hal ini tidak dikendalikan dengan cepat dikhawatirkan akan memicu terjadinya gelombang ke dua pandemi Covid 19 di Propinsi Sumatera Barat.

D. EVALUASI DAN KEBUTUHAN KEBIJAKAN EKONOMI

Tidak ada satupun pemerintah propinsi yang mampu mencapai penyerapan anggaran 50% sampai pada akhir semester I. Dampak yang ditimbulkan adalah mengendapnya dana pemerintah daerah pada perbankan mencapai Rp. 170 Triliun. Harapan untuk masing-masing pemerintah propinsi adalah harus mampu menggenjot penyerapan anggaran untuk menghadapi perekonomian dalam masa new-normal selanjutnya.

Pada sisi supply, pemerintah memberikan kebijakan pengurangan pajak dan bantuan untuk dunia usaha dalam mengurangi biaya adalah hal positif dari sisi dunia usaha. Namun permasalahan yang terjadi adalah permintaan terhadap barang dan jasa di berbagai sektor tetap rendah selama pandemic dan memberikan insentif kepada unit usaha tetap mengurangi bahkan menghentikan produksi.

Evaluasi dan rekomendasi kebijakan dalam menghadapi tatanan berkehidupan baru (new normal) untuk 3 (tiga) bulan, 6 (enam bulan) dan 1 (satu) tahun ke depan di Propinsi Sumatera Barat: *Pertama*, Sebetulnya tidak ada *trade-off* antara penanggulangan kesehatan dengan

pemulihan ekonomi yang disebabkan oleh pandemic Covid 19 dalam periode new-normal. *Kedua*, Penanggulangan kesehatan merupakan syarat butuh baru (*new-necessary condition*) untuk menjadikan percepatan pemulihan ekonomi dapat dilaksanakan. Pemerintah perlu memastikan terlaksananya dengan baik protocol Covid 19 pada individu, rumah tangga, komunitas, pasar, sekolah, perkantoran dan sarana wisata dan fasilitas public lainnya. *Ketiga*, Pemulihan ekonomi yang dilakukan dengan pendekatan pada sisi demand side dan sisi supply side merupakan perlu (*sufficient condition*) dalam mengembalikan kinerja ekonomi seperti sebelum pandemic Covid 19.

Keempat, Stimulus lanjutan yang diperlukan pada sisi *demand* adalah pengalokasian Bantuan Langsung Tunai (BLT) pemerintah memerlukan pola distribusi pada satu pintu agar tidak terjadi *overlapping* pada rumah tangga penerima. Kriteria yang dapat digunakan adalah terjadinya pemutusan hubungan kerja/PHK, kehilangan mata pencaharian dan penurunan daya beli dalam pemenuhan kebutuhan pokok. Pemerintah daerah secara *real-time* harus terus melakukan updating terhadap *data-based* kemiskinan.

Kelima, Stimulus lanjutan yang juga diperlukan pada sisi supply adalah percepatan stimulus ekonomi dan keuangan daerah dengan fokus alokasi untuk penguatan sektor pertanian. Pemerintah juga memperkuat stimulus ekonomi dan keuangan untuk usaha mikro kecil (UMK) yang berbasis pertanian dan pariwisata. Stimulus ekonomi dan keuangan diberikan juga untuk mengembangkan digitalisasi ekonomi yang tepat guna untuk UMK yang bergerak disektor pertanian dan pariwisata.

Keenam, Pertanian merupakan sektor penyangga utama terhadap terpaan pandemic Covid 19 di Sumatera Barat. Perlu memanfaatkan momentum pandemic untuk pemenuhan kebutuhan pangan lokal dan swasembada pangan serta memperkuat jalur distribusi untuk pemenuhan kebutuhan lokal dan propinsi sekitar baik secara konvensional maupun pemanfaatan digitalisasi ekonomi.

Ketujuh, Penguatan sektor pariwisata dan sektor ekonomi pendukungnya seperti akomodasi dan makan minum, perdagangan dan transportasi serta UMKM pendukungnya. Penguatan UMKM pendukung ini dapat dikategorikan menjadi UMKM ketahanan pangan, UMKM potensi Ekspor dan UMKM pendukung pariwisata. Kelayakan alam, budaya dan spirit wirausaha masyarakat dapat dijadikan sebagai spirit utama dalam pengembangan sektor pariwisata di Sumatera Barat.

Kedelapan, Industri pengolahan masih menjadi potensi ekonomi dengan fokus kepada sektor komoditas unggulan. CPO dan beserta produk olahannya masih menjadi pendorong ekonomi propinsi Sumatera Barat. Ekonomi kreatif, pengembangan ekonomi syariah dan digitalisasi ekonomi juga dipandang perlu dalam mendukung perekonomian daerah untuk cepat pulih terutama dalam menghadapi periode berkehidupan baru (new-normal).

E. PENUTUP

Sudah beberapa kali Indonesia krisis ekonomi dengan beragam faktor pemicunya, Propinsi Sumatera Barat dalam menghadapi pandemic Covid 19 terlihat lebih memiliki daya tahan secara ekonomi (*economic resilience*) di dibandingkan dengan propinsi lain. Penurunan kinerja ekonomi terjadi namun tidak separah yang dirasakan oleh propinsi lain. Dalam memasuki tatanan kehidupan baru, Propinsi Sumatera Barat memiliki harapan yang tinggi terhadap perekonomian daerah. Ekspektasi ini merupakan energi besar yang dapat mendorong perekonomian daerah untuk lebih cepat bangkit dari krisis dengan persyaratan baru selalu tetap memastikan diri baik di tingkat individu, rumah tangga, komunitas dan sarana public lainnya menggunakan protocol Covid 19 dalam melaksanakan aktifitas ekonomi. Kajian ini memiliki keterbatasan dalam hal metode analisis yang digunakan yang masih bersifat deskriptif. Ke depan diharapkan penelitian yang menjelaskan dampak pandemic terhadap perekonomian Sumatera Barat membutuhkan analisis ditingkat individu rumah tangga dan dunia usaha dalam menjelaskan respon agen ekonomi daerah dalam menghadapi krisis.

F. ACKNOWLEDGMENT:

Penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada Prof. Dr. Werry Darta Taifur (Ketua I.S.E.I Cabang Padang) yang memberikan dukungan dalam menginterpretasikan temuan dari hasil kajian ini. Selanjutnya terima kasih juga diberikan kepada Ibu Rini Rahmahdian, SE, MSE dan Ibu Adilla Adisti, SE, M.Ec yang juga turut melakukan review secara konfrehensif kajian ini. Terima kasih

G. DAFTAR PUSTAKA

- Adrison, V & M. Flukera (2016), Lowering Regional Inflation? Improve Budget Absorption. *Economics and Finance in Indonesia* 62 (2), 67-77
- Badan Pusat Statistik Sumatera Barat (2020). Sumatera Barat Dalam Angka 2020. BPS Propinsi Sumatera Barat.
- Badan Pusat Statistik Sumatera Barat (2020) Laporan Perekonomian Propinsi Sumatera Barat, 5 Agustus 2020.
- Bank Indonesia Sumatera Barat (2020). Laporan Perekonomian Propinsi Sumatera Barat Mei 2020. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat
- Bank Indonesia Sumatera Barat (2020). Laporan Perekonomian Propinsi Sumatera Barat Februari 2020. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat
- Bhargava, A, Lawrence J. Lau & Christopher J.LMurray. (2001). Modeling the effects of health on economic growth. *Journal of Health Economics* Volume 20, Issue 3, May 2001, Pages 423-440
- Bloom, David, E, Jeffrey D. Sachs, Paul Collier and Christopher Udry (1998). Geography, Demography, and Economic Growth in Africa. *Brookings Papers on Economic Activity* Vol. 1998, No. 2 (1998), pp. 207-295
- Cuddington, J. T. and J. D. Hancock (1994). Assessing the Impact of AIDS on the Growth Path of the Malawian Economy. *Journal of Development Economics*
- Cuddington, J. T., J. D. Hancock, et al. (1994). A Dynamic Aggregate Model of the AIDS Epidemic with Possible Policy Interventions. *Journal of Policy Modeling*
- Fernandes, N (2020). Economic Effects of Coronavirus Outbreak (COVID-19) on the World Economy. University of Navarra, IESE Business School; European Corporate Governance Institute (ECGI)
- Haacker, M., Ed. (2004). *The Macroeconomics of HIV/AIDS*. IMF, Washington DC
- McKibbin, Warwick and Roshen Fernando.2020. *The Global Macroeconomic Impacts of COVID-19: Seven Scenarios*.
- Pritchett dan Summer (1996). Wealtier and Healtier, *Journal of Human Resources*. vol. 31, issue 4, 841-868
- Robalino, D. A., A. Voetberg, et al., (2002b). The Macroeconomic Impacts of AIDS in Kenya Estimating Optimal Reduction Targets for the HIV/AIDS Incidence Rate. *Journal of Policy Modeling*
- Surico, Paolo and Galeotti, Andrea (2020). *The Economics of a Pandemic: the Case of Covid-19*. LBS